

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MUTU TERHADAP PERFORMANSI SMK TEKNOLOGI

[Studi Evaluasi Sistem Administrasi SMK Teknologi di Jawa Barat Tahun 2005]

Wowo Sunaryo Kuswana
(Universitas Pendidikan Indonesia)

Evaluasi Dampak kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Kalimat "usaha untuk menentukan" digunakan dalam pembahasan ini karena evaluasi dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang sebenarnya dari kebijakan, suatu tugas yang sebenarnya sangat kompleks dan sulit.

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai tindak lanjut dari strategi pembangunan pendidikan menengah kejuruan, telah ditetapkan seperangkat kebijakan guna meningkatkan mutu pengelolaan SMK. Kebijakan yang telah ditetapkan, dan yang harus dilaksanakan oleh sekolah sebagai kelompok sasaran, antara lain:

Pertama, ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal sebagai “basis requirement” atau batas ambang, sarannya setiap satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, untuk menerapkan pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan program keahlian. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasar kan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001.

Kedua, pola induk Sistem Pembelajaran dan Pengujian Hasil Belajar pada 22 bidang keahlian (93 program keahlian) untuk level dasar, level lanjut dan level spesialisasi. Pola induk ini berisi dokumentasi yang dijadikan acuan dasar bagi sekolah dalam pelayanan PBM di kelas, laboratorium atau bengkel praktik dan di industri. Sasarannya adalah guru dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, melalui pemilihan, pendekatan, strategi, model belajar, metode, teknik, bahan ajar dan media, sistem penilaian, yang dirancang secara terpadu. Selain itu adanya jalinan pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama industri bagi seluruh sekolah untuk berbagai bidang keahlian. Adapun mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik dilandasi oleh; (1) standar kompetensi; (2) kegiatan belajar (penilaian proses); (3) verifikasi internal, dan (4) verifikasi eksternal oleh lembaga independen.

Ketiga, untuk mengukur, menilai, mengevaluasi, dan pemberian pengakuan dilaksanakan akreditasi. Akreditasi Sekolah mempunyai makna salah satu kegiatan penilaian kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, serta hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Tujuan akreditasi berdasarkan aspek formal yaitu: (1) memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan serta peningkatan mutu pendidikan; (2) menentukan tingkat kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Kebijakan tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/ Tahun 2000.

Secara umum kebijakan tersebut, sebelum dilaksanakan telah disosialisasikan dan diberikan dukungan implementasi dalam berbagai bentuk pembinaan serta bantuan perangkat lunak dan keras melalui birokrasi di lingkungan Direktorat Pembinaan SMK.

Perangkat kebijakan yang dikemukakan, menarik untuk dikaji berdasarkan telaahan akademik, terutama dalam pelaksanaan dan implikasinya kepada kelompok sasaran dilapangan. Hal itu, untuk mengetahui sampai sejauhmana praktik kebijakan sejalan dengan teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Meter.V dan Horn.V (Winarno, 2002:106) ‘kebijakan mengandung dua karakteristik, yakni jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeranserta dalam proses implementasi berlangsung’. Oleh karena itu, sebelum menetapkan fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan, terlebih dahulu dilakukan studi pendahuluan mengenai keberadaan SMK Teknologi hubungannya dengan ketenagakerjaan dan lapangan kerja.

Temuan studi pendahuluan mengindikasikan adanya fenomena yang paradoks pada satu sisi, namun optimisme pada sisi lain mengenai keberadaan SMK Teknologi di Jawa Barat. Ditinjau dari sisi paradoks, menunjukkan indikasi adanya kelemahan dari sisi proses pelayanan yang digambarkan oleh capaian uji coba standar kelulusan sebagai prasyarat dunia industri belum memuaskan. Demikian pula dunia usaha sebagai lapangan kerja mengalami penurunan tajam disebabkan oleh sistem perekonomian nasional yang belum membaik sebagai dampak krisis ekonomi. Dipandang dari sisi optimisme, faktor kuantitas, keberagaman program keahlian dan penyebaran sekolah dengan perolehan hasil akreditasi sekolah yang cukup signifikan, serta ada komitmen pembinaan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Sejalan dengan dinamika lingkungan yang terjadi, maka dari itu tantangan pelayanan pendidikan di lingkungan SMK Teknologi menjadi sangat kompleks. Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasar-kan,tinjauan;(a) kebijakan publik dengan pelaksanaan *Good Governance* melalui Manajemen Berbasis Sekolah, yang dicirikan oleh kemitraan, keterlibatan pengambilan keputusan, dan keterbukaan; (b) kebijakan pendidikan menyongsong diberlakukannya PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, yang saat ini baru ditetapkan Standar Isi dan Standar Kelulusan melalui Keputusan Mendiknas No 22 dan 23 tahun 2006; (c) dunia usaha dan industri sebagai pengguna lulusan, melalui penerapan sertifikasi bagi keahlian yang dibutuhkan; (d) tuntutan individu, keluarga dan masyarakat yakni bekal kecakapan hidup untuk hidup bagi lulusan.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah; “Seberapa besar dampak implementasi kebijakan pengendalian mutu terhadap performansi SMK Teknologi di Jawa Barat ?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi kebijakan pengendalian mutu pendidikan terhadap performansi SMK Teknologi di Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi telaahan teoretis dan praktis. Secara teoretis, bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi pendidikan khususnya konsentrasi kebijakan, dan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak berwenang di lapangan yang bertanggung jawab dalam pembinaan pendidikan teknologi dan kejuruan.

D.Asumsi-asumsi Penelitian

Telah kita ketahui bahwa proses kebijakan dapat dilalui melalui proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal itu, termasuk dalam bidang pendidikan menengah kejuruan. Pada tingkat puncak para pengambil keputusan pendidikan, telah merumuskan kebijakan pengendalian mutu pendidikan menengah kejuruan, yang berfungsi sebagai regulasi untuk

mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Direktorat Pembinaan SMK telah menetapkan berbagai perangkat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SMK sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan yang terkait dengan regulasi yang berorientasi pada mutu tidak dapat dilepaskan dari fungsi administrasi pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh organisasi sekolah itu sendiri.

Sekolah sebagai organisasi pelayanan pendidikan, tentunya dituntut mampu melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. Hal itu, sejalan dengan pendapat Vladimir Gasskov (2000:53) mengemukakan bahwa pentingnya kebijakan internal untuk membangun sistem dan asumsi-asumsi dasar sebagai prosedur agar semua program terlaksana secara efektif, hal itu terkait dengan; (1) sistem pengorganisasian; (2) penetapan sumber daya manusia; (3) perencanaan dan penetapan badjet anggaran; (4) pembiayaan; dan (5) mengendalikan pencapaian.

Bertitik tolak dari paparan tersebut, sebagai kerangka berpikir penelitian, yakni; “jika unit sasaran SMK Teknologi mempunyai kemampuan mengakses, memanfaatkan informasi dan melaksanakan kebijakan secara konsekuen, yang didukung oleh sumber-sumber daya pendidikan, serta proses transformasi yang efektif, maka prestasi merupakan salah satu faktor standar performansi sekolah dapat dicapai”.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis deskriptif dalam penelitian ini adalah: “Terdapat pengaruh yang signifikan implementasi kebijakan pengendalian mutu, pengembangan input sumber-sumber daya pendidikan, melalui proses transformasi terhadap performansi SMK Teknologi di Jawa Barat”.

1. Terdapat pengaruh yang signifikan konteks kebijakan pengendalian Mutu (X1), melalui proses transformasi (X3) terhadap prestasi SMK Teknologi di Jawa Barat (Y)
2. Terdapat pengaruh yang signifikan pengembangan Input Sumber-Sumber Daya Pendidikan (X2) melalui proses transformasi (X3) terhadap prestasi SMK Teknologi di Jawa Barat (Y)
3. Terdapat pengaruh yang signifikan proses transformasi (X3) terhadap prestasi SMK Teknologi di Jawa Barat (Y)
4. Terdapat pengaruh yang signifikan konteks kebijakan pengendalian mutu (X1), pengembangan sumber-sumber daya pendidikan (X2), melalui proses transformasi (X3), terhadap prestasi SMK Teknologi (Y)

F. Metode Penelitian

Penelitian ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, yang intinya melakukan penyusunan berbagai perangkat yang sesuai dengan kaidah penelitian. Perangkat tersebut, mencakup menetapkan populasi dan sampel, pilihan teknik dan penyusunan kisi-kisi instrumen, teknik pengumpul data, teknik pengolahan data, pengujian validitas dan validitas alat ukur, sedangkan metode yang digunakan adalah eksplanatory survey. Mengingat tidak terdapat kerangka sampling maka dalam penelitian ini, menggunakan sampling cluster sesuai dengan luas permasalahan serta keterbatasan yang terjadi. Hasil perhitungan yang dijadikan unit analisis karakteristik sampel dari sejumlah 55 SMK Negeri dan Swasta diwakili oleh sekitar 405 responden yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

G. Hasil Penelitian

1. Kesimpulan

a. Kemampuan mengadaptasi konteks kebijakan pengendalian mutu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMK Teknologi di Jawa Barat sesuai dengan potensi daerah masing-masing telah mengadaptasi kebijakan pengendalian mutu yang datang dari pihak berwenang. Hal itu, diperoleh melalui penerimaan langsung dalam kegiatan sosialisasi dari agen kebijakan (Direktorat Pembinaan SMK, Dikmenti Provinsi dan pengawas). Demikian pula bagi sekolah yang belum memperoleh informasi langsung, sekolah mendapatkannya melalui musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Sehingga sekolah yang belum memperoleh informasi langsung dapat perolehan informasi sekaligus dokumen perangkat kebijakan.

Ditinjau dari dampak implementasi kebijakan pengendalian mutu, SMK Teknologi sebagai kelompok sasaran, pada umumnya telah termotivasi untuk berupaya menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. Salah satu dari prinsip yang dilakukan yakni, aktivitas menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam suatu kesatuan sistem perencanaan strategik. Hasil analisis kelompok kerja, berupa data informasi selanjutnya dielaborasi dan internalisasi ke dalam rumusan kebijakan sekolah secara normatif.

b. Kemampuan pengembangan input sumber-sumber daya pendidikan

Dimensi kemampuan internalisasi hasil analisis dinamika lingkungan strategis, tampak dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Secara eksplisit, dituangkan ke dalam Rencana Strategi dan Rencana Operasional sekolah berupa program secara rinci dengan sasaran pengembangan komponen sumber-sumber daya pendidikan sebagai instrumen input. Pengembangan instrumental input, mencakup KTSP, Potensi Peserta Diklat; Potensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan; Sarana Prasarana; Organisasi Sekolah; Pembiayaan; Ketatausahaan dan Perkantoran; Regulasi Sekolah; Peranserta Masyarakat dan Budaya Organisasi Sekolah.

Persoalan yang muncul dari sebagian besar sekolah, adalah dihadapkannya kepada keterbatasan sumber-sumber daya pendidikan di sekolah. Keterbatasan terletak pada rasio kebutuhan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dengan siswa yang mempelajari bidang keahlian, sarana rasio sarana dan prasarana praktikum, rasio rombongan belajar dengan ruang praktik, serta tempat praktik industri, khususnya di kabupaten dan kota yang jauh dari industri. Demikian pula di beberapa SMK Teknologi, dihadapkan pada sarana prasarana praktik yang sudah mengalami kerusakan dan ketinggalan teknologinya. Konsekuensinya, selaras dengan peluang terbatas yang ada terutama dari pemerintah pusat, setiap sekolah berlomba untuk mengajukan program kerja berupa proposal untuk memperoleh bantuan. Bagi sekolah yang termasuk ke dalam kelompok rendah dan belum memperoleh bantuan pemerintah pusat, tampaknya sumber-sumber masih bertumpu dari kemampuan masyarakat orang tua di sekolahnya.

Namun demikian bagi sekolah tertentu yang telah mempunyai performansi unggul, peluang pengembangan lebih besar mengingat sumber lain bisa digali seperti dari pihak industri atau sumbangan dari donatur. Bahkan beberapa SMK Teknologi yang mempunyai kekuatan infrastruktur, sarana prasarana dan sumber daya manusia, telah mampu membuka unit produksi. Keuntungan dari penyelenggaraan unit produksi dapat dirasakan

bagi; (a) kepentingan proses pembelajaran, dan (b) finansial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemeliharaan dan kesejahteraan sekolah.

c. **Proses transformasi input sumber-sumber daya pendidikan**

Proses transformasi sumber-sumber daya pendidikan, menunjukkan adanya kekuatan pengaruh yang signifikan terhadap performansi sekolah. Proses kepemimpinan kepala SMK Teknologi, menunjukkan adanya kecenderungan untuk memacu dirinya guna meningkatkan kapasitas organisasi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, melalui pengembangan input sumber-sumber daya pendidikan yang terbatas. Perubahan teknik dan pendekatan pemecahan masalah di lingkungan sekolah dikembangkan, bahkan dalam suasana percepatan implementasi kebijakan pengendalian mutu seringkali menimbulkan konflik yang dirasakan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Situasi perepti itu, merupakan tantangan yang dihadapi dalam transformasi kepemimpinan kepala sekolah, implikasinya para kepala sekolah terus berupaya meningkatkan kemampuan profesionalismenya melalui pengembangan diri guna memecahkan permasalahan yang timbul.

Proses transformasi manajemen menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan pengendalian mutu melalui rekayasa manajemen sekolah. Hampir semua sekolah, secara konseptual telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan prinsip MBS. Persoalan yang dihadapi sekolah adalah bagaimana mengelola sumber-sumber daya terbatas pada satu pihak, dan tuntutan pemenuhan kebutuhan terstandar di lain pihak. Kompleksitas manajemen dapat diatasi dengan berbagai upaya, salah satunya melalui musyawarah pada tingkat komite sekolah untuk melakukan kesepahaman dan kesepakatan guna pemenuhan kebutuhan.

Proses transformasi belajar mengajar merupakan inti dari pelayanan sekolah, dalam hal ini di beberapa sekolah, masih terdapat, kesenjangan baik ditinjau dari daya dukung sarana prasarana praktikum, kompetensi guru, model pembelajaran, dan penilaian. Hanya sebagian kecil sekolah yang telah mendekati standar pelayanan khususnya di lingkungan SMK Teknologi ternama. Aktivitas pembelajaran telah dilengkapi dengan bahan ajar modul, rasio guru dengan siswa saat praktik telah dipenuhi, peralatan berdasarkan rasio alat dengan siswa, waktu dan tempat penggunaan, penilaian melalui verifikasi internal dan eksternal.

Namun sebagian besar SMK Teknologi, pelayanan PBM belum optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal. Oleh sebab, itu kebijakan pengendalian mutu dikaitkan dengan pelayanan PBM di kelas, bengkel dan industri masih perlu terus dikembangkan, melalui aksi verifikasi yang benar, jujur agar hasilnya dapat dijadikan perbaikan semua pihak.

Komponen output mewujud pada performansi sekolah, merupakan sesuatu yang dapat diestimasi capaiannya berdasarkan data-data sebelumnya. Hal itu berlaku bagi setiap sekolah baik negeri maupun swasta. Tiga komponen output yang dipandang utama, yakni prestasi akademik melalui ujian kompetensi dan ujian nasional secara kuantitatif hasilnya bervariasi, serta telah terdokumentasi. Prestasi non akademik, setiap sekolah mempunyai keunggulan yang bervariasi sesuai dengan potensi, mulai dari lomba-lomba bernuansa prestasi olah raga, kesenian, kepramukaan sampai lomba kreativitas siswa baik tingkat lokal maupun nasional. Demikian pula, pada beberapa SMK Teknologi telah menghasilkan guru-guru yang mempunyai prestasi dalam berkarya sebagai tenaga pengajar, maupun peranannya sebagai tenaga ahli bidang teknik.

d. Dampak implementasi kebijakan terhadap prestasi SMK Teknologi

Secara umum, ditinjau dari pengaruh variabel konteks kebijakan, pengembangan sumber-sumber daya pendidikan, melalui variabel moderator proses transformasi terhadap prestasi sekolah mempunyai kekuatan secara signifikan dengan nilai kontribusi 69,40% dan termasuk pada kriteria sedang. Adapun yang paling kuat memberikan pengaruh pada performansi sekolah, adalah pengembangan organisasi sekolah, peranserta masyarakat, kepemimpinan kepala sekolah dan proses belajar mengajar.

e. Perbedaan performansi SMK Teknologi di Jawa Barat

Performansi SMK Teknologi, hasil identifikasi penelitian terdapat tipologi sekolah antara lain; enam buah atau 10,90 % kategori pengawasan operasional; sembilan buah atau 16,36% kategori pembinaan operasional; sepuluh buah atau 18,18% pembinaan manajemen; sepuluh buah atau 18,18% kategori peningkatan ke arah potensial; sepuluh buah atau 18,18% kategori potensial persiapan standar; enam buah atau 10,90% dalam kategori siap standar nasional; dan tiga buah atau 5,45% dalam kategori memasuki sekolah standar internasional.

2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dampak implementasi kebijakan pengendalian mutu pendidikan menengah kejuruan terbukti memberikan stimulus yang direspons secara positif oleh kelompok sasaran yakni SMK Teknologi, baik Negeri maupun Swasta. Ditinjau dari kebermaknaan kebijakan terkandung sejumlah implikasi bagi implementor, berkenaan dengan pengendalian mutu dalam operasionalnya, sebagai berikut:

a. Implikasi Praktis

Kebijakan yang telah diputuskan oleh pihak berwenang, dalam bentuk perangkat yang harus dilaksanakan sebagai regulasi dalam konteks pengendalian mutu, telah memberikan suatu dorongan bagi sekolah untuk membangun daya saing dan kemandirian.

Secara praktis implementasi kebijakan pengendalian mutu yang ditetapkan saat ini, cenderung masih bersifat top down dan masa transisi sebelum dilaksanakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian bagi semua pihak perlu direspons sebagai stimulus promosi bagi sekolah yang mempunyai kemampuan melaksanakan dengan efektif. Dalam praktiknya tentunya masih perlu disikapi secara proporsional dan profesional, sehingga sekolah mempunyai kemandirian yang dilandasi oleh prinsip-prinsip akuntabilitas, dan tanggungjawab.

Kemandirian yang diharapkan dari SMK Teknologi di masa depan, sangat berat dikaitkan dengan berbagai ketidakpastian dan kebolehjadian. Dengan demikian dalam menyongsong berlakunya Standar Nasional Pendidikan, merupakan tantangan yang harus dihadapi melalui kekuatan, sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan), kapabilitas kepala sekolah, kapasitas organisasi yang membentuk iklim kondusif dan kemitraan dengan masyarakat dunia usaha, dunia industri dan orang tua yang harmonis.

Performansi sekolah di masa depan, bukan lagi sekolah yang tergantung kepada kekuatan pemerintah pusat semata-mata melainkan dibangun oleh kemandirian dan kerjasama. Sumber-sumber daya yang terbatas, harus mampu dikelola secara efektif dan efisien dan

dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di lingkungannya. Proses transformasi, harus terukur sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan agar keluaran menjadi nilai jual tinggi. Bagi SMK Teknologi, totalitas pengorbanan yang dikeluarkan merupakan nilai jual bagi kepuasan masyarakat primer, sekunder dan tersier. Performansi sekolah akan tercermin dari :

- (1) Prestasi akademik, non akademik dan kekaryaan
- (2) Penyerapan lulusan di dunia kerja baik terinstitusi maupun mandiri
- (3) Mobilisasi lulusan di dunia kerja dan dunia usaha
- (4) Perolehan pendapatan lulusan di masa depan
- (5) Jaringan kejasama pendidikan dengan dunia usaha dan industri

b. Implikasi Teoritis

Berdasarkan temuan dan kesimpulan, peneliti membangun prinsip dan dalil pengembangan mutu pendidikan kejuruan.

- (1) Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu instrumental input sebagai faktor penentu kemandirian sekolah dalam proses transformasi untuk mencapai hasil maksimal
- (2) Kapasitas organisasi sekolah dibangun oleh kekuatan, budaya pembelajar, budaya dot-net, budaya kerja dan didukung oleh kemampuan manajemen konflik.
- (3) Kemitraan dengan masyarakat (dunia industri, dunia usaha dan orang tua), bersifat saling menguntungkan dan menyenangkan.
- (4) Kapabilitas pimpinan kepala sekolah, dituntut mempunyai komitmen terhadap peningkatan mutu, melalui transformasi pengembangan intelektual personil (kompeten), kredibilitas (jujur), kesantunan dalam berkomunikasi dengan personil (luwes), berkeadilan dalam pemberian motivasi dan hukuman, serta keteladanan dalam berbagai tindakan dan penuh kasih sayang terhadap siapapun yang dilayaninya.
- (5) Membangun jaringan yang harmonis dengan institusi pemerintah daerah, institusi industri dan tokoh-tokoh masyarakat yang termasuk dalam komite sekolah dan dewan pendidikan di setiap kabupaten dan kota.
- (6) Setiap kegiatan dalam program sekolah, harus ditetapkan tolok ukur atau kriteria keberhasilannya dengan dilandasi oleh ketetapan standar nasional atau internasional.
- (7) Sekolah harus taat asas, taat ukuran, taat waktu dalam melaksanakan sistem evaluasi program dan menindaklanjuti dari hasil evaluasi.
- (8) Sekolah harus terbuka kepada masyarakat dalam pertanggung-jawaban pelayanan, melalui prosedur dan etika organisasi.
- (9) Pembelajaran dikembangkan berdasarkan pendekatan, strategi, model dan teknik yang merupakan replika kerja di industri sesuai dengan bidang keahliannya.
- (10) Lingkungan sekolah, diciptakan nyaman, tenang dan memenuhi syarat estetika
- (11) Sistem promosi sekolah sudah saatnya memanfaatkan teknologi informasi, sebagai media komunikasi, media belajar dan pemasaran lulusan.

3. Rekomendasi

Sejalan dengan kesimpulan penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Bagi pihak yang berwenang dalam menetapkan kebijakan

Pertama, kebijakan pengendalian mutu sebagai stimulus dan sarana pemecahan masalah perbaikan mutu proses serta hasil pendidikan di sekolah, perlu dilakukan pengkajian

secara komprehensif pada tiap tingkatan organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan, diperkuat oleh keterlibatan pihak sekolah dan masyarakat dengan dukungan data hasil analisis kebutuhan tingkat operasional secara akurat. Artinya, kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan kebutuhan pengembangan sekolah. Sehingga perumusan kebijakan merupakan, rangkaian awal dari langkah pelaksanaan *Good Governance*.

Kedua, pelaksanaan kebijakan pada tingkat operasional di sekolah masih perlu dilakukan pendampingan ahli, sokongan sumber-sumber daya pendidikan yang memadai, baik dari pihak pemerintah daerah maupun pusat dan penilaian berkesinambungan serta mempromosikan sekolah yang berkualitas secara objektif. Termasuk dalam pemberian bantuan sebagai stimulus, harus dilandasi keadilan, kecukupan, efektivitas dan efisien.

Ketiga, evaluasi kebijakan dilaksanakan secara kontinu selama batas waktu tertentu, dan adanya sanksi yang tegas bagi penyelenggara pendidikan menengah kejuruan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketegasan dari regulasi tersebut, melalui tahapan pengawasan operasional, rekomendasi merger, sampai dengan tindakan penutupan operasional sekolah.

b. Bagi pihak SMK Teknologi di Jawa Barat;

Sekolah dalam menggali, mendistribusikan, dan memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan sebagai komponen input, harus dilandasi oleh prinsip skala prioritas pencapaian sasaran yang dilandasi kriteria kinerja masing-masing kegiatan dengan memperhatikan potensi sekolah. Demikian pula dalam upaya meningkatkan prestasi sekolah, perlu dibangun peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui pembelajaran organisasi, sehingga tercipta kondisi manajemen sekolah yang inovatif dan mengarah kepada pelayanan pembelajaran sesuai dengan tuntutan standar nasional dan internasional. Sekolah dalam mengembangkan mutu, dapat dimulai dari menata manajemen berbasis kinerja yang menjamin adanya saling kepercayaan, yang ditandai oleh transparansi, partisipatif, dan berkolaborasi dengan industri, sehingga terwujud komitmen mutu yang terukur. Mutu yang terukur, harus dimulai dari pelayanan hal-hal kecil, sangat mendasar sampai dengan mutu harapan dan berisiko jangka panjang yaitu kepuasan pelanggan.

Bagi sekolah yang belum mampu menunjukkan performansi secara optimal, disarankan untuk melakukan merger dengan sekolah lain yang sejenis melalui perundingan di bawah pengawasan dinas provinsi atau kabupaten dan kota. Hal itu, patut dipertimbangkan dengan penuh kesadaran, proporsional dan profesional agar masyarakat tidak dirugikan oleh pelayanan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Kerena apabila tidak dilakukan, pertimbangan seperti yang dikemukakan, akan merugikan martabat profesi di lingkungan Penyelenggara Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.

- c. Bagi peminat penelitian dimungkinkan, adanya penelitian lanjutan berkenaan dengan sistem pengendalian mutu di lingkungan SMK Teknologi, melalui pendekatan analisis kebijakan yang cakupannya wilayahnya lebih luas. Khususnya berkenaan dengan organisasi sekolah, sarana dan prasarana belajar dan pembiayaan, peranserta masyarakat, kepemimpinan dan implementasi kurikulum serta proses belajar mengajar di SMK Teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyd,H.(2000).*Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Amelsvoort, H. W. C. H., Scheerens.(1997). "Policy Issues Surrounding Processes of Centralization and Decentralization in European Education Systems". *Journal of Educational Research and Evaluation*, 3 (4), pp. 340363.
- Amstrong.M. (1995). *Performance Management*. New York: Mc Graw Hill.
- Anderson,L.W.;Ryan,D.W; Shapiro, B.(1989). *The EA Classroom Environment Study*. Oxford: Pergamon Press.
- ANTA (Australian National Training Authority) 2002, *The Australian Quality Training Framework*,<http://www.anta.gov.au> [accessed Dec. 2004].
- 2001,*Australian Quality Training Framework*, <http://www.anta.gov.au/aqtfwhatasp> [accessed Dec.2004].
- Arcaro, Jerome S. (1995), “*Quality in Education, an Implementation Hand Book*”, ST. Lucie Press, 100 Linton Blvd, Suite 403 B Delray Beach, FL 33483.
- Arnoldo,C.Hax,Nicolas S. Majluf (1996), “*The Strategy Concept and Process A Pragmatic Approach Second Edition*”. New Jersey: Prentice Hall.
- Aterbury. (1991) *School Based Management: Organizing for High Performance*: San Fransisco: Josey.Bass Publishers.
- Atkinson.P. (1992). *Managing Performance. Managing Service Quality*. March.
- Bacal Robert.(1999). *Perpormance Management*. USA:Mc Graw Hill Co.
- Bauer, R. A. (1988). *He Study of Policy Formation*. New York : Free Press.
- Beer,M. 1981). *Performance Appraisal, Dilemmas and Possibilities, Organization Dynamic*. Winter.
- Blau, Peter dan Marshall W.Mayer, Penerjemah : Gary Rachman Jusuf.(1987). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta : UI Press.
- Caldwell, B.J. (1993).*Accounting for Current and Emerging Patterns of School Management*. Melbornne.
- Campbell.D.(1990). *The Force Prejudice*. The Guardian, October.
- Cheng, Y.C.(1993). *Conceptualization and Measurement of School Effectiveness: an Organizational Perspective*. Atlanta: AERA paper.
- Chinien Chris (2002).*Review of Vocational Education and Training in Schools*. Department of Education and Training, 151 Royal Street, East Perth WA 6004.
- Coit, F.B.(1972). *Instructional System Development for Vocational and Technical Training*. New Jersey: Educational Technology Publication.
- Cotton,K.(1995).*Effective Scholing Practices:a Research Synthesis*. Northwest Regional Educational Laboratory.
- Crosby,P.B (1990).*Managing for Total Quality*.New York:Prentice-Hill.
- Dale,R.(1985).*Educational, Training (Employment : Towards a new Vocationalism*.England: Open University Set Book. Pergamon Press LTd.
- Daniel.J.R., Herbert Sherman (1999), “*From Strategy to Change: Implementing The Plan In Higher Education*”. San Fransisco: Jossey-Bass.

- Darma, S.(2005).*Manajemen Kinerja*.Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Delors, J. (1996). *Production and Operations Management. Strategic and Tactical Decision*.USA: Prentice Hall International Inc.
- Dolbeare, "The Impact of Public Policy, Political Science Annual: An International Review",Volume 5 (C.P.Cotter,ed.) Indianapolis: Bobbs-Merill.
- Donalds Van Meter, and Carl E Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,"*Administration and Society*,Vol. 6, No.4, February 1975.
- Dubois,D. (1993). *Comtepecy-Based Performance Improvement: A Strategy for Organizational Change*.USA : Pan-American Conventions.
- Duke L.D. (1991).*School Policy*. New York : McGraw Hill Inc.
- Dunn, W.N. (2001). *Public Policy Analysis: an Intruduction*. Terjemahan Muhajir Darwin : Yogyakarta : Hanindia Graha Widya.
- Dy,Thomas.R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs. NJ.Prentic-Hall.
- Edwards 111, George C.(1980). *Implementing Public Policy* : Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Effendi, Sofyan. (1986).*Pelayanan Publik, Pemerataan dan Admnistrasi Negara Baru*, Dalam Prisma No 12, Jakarta :LP3ES.
- Ernest.R.H.(1974). *The Politics of Education Inovation*. California : Ubana Illinoi
- Farrugia.C.(1994), "A Continuing Professional Development Model for Quality Assurance in Higher Education", *Journal Quality Assurance in Education*.
- Fieldmen.,Dabiel.(1999). *Organization Behavior*. Singapore: McGraw-Hill.
- Garvin (1994); *Beyond Total Quality Management*: New York: McGraw-Hill, Inc.
- Gasperez,V.(1977).*Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gasskov.V. (2000). *Managing Vocational Training Systems*. Geneva : International Labour Office.
- Gitlow, H.S. dan Shelly, J.G. (1994). *Total Quality Management*. New Jersey: PTR Prentice Hall Englewood Cliffs.
- Goetsch,D.(1994).*Introduction to Total Quality: Quality, Productivity, Competitiveness*. Englewood : Prentice Hall.
- Good,C.V.(1973).*Dictionary of Education*.New York:McGraw-Hill Book Company.
- Goodlad, John. (1975). *The Dynamic of Educational Change: Towards Responsive School (Ideas Report on Schooling)*. New York: Mc. Graw Hill Book Company.
- Gordon A. Richard. (1976). *School Administration:Challange and Opportuniy for Leadership*. Iowa: Wm C.Brown Company Publisher.
- Grote.D.(1996). *The Complete to Performance Appraisal*. New York: Amacom.
- Guthie W. James and, Rodney.(1991). *Educational Administration and Policy. Effectife Leadership for Amiracan Eduaction*.Second Edition. Massachutesetes: A Division of Simon & Schuster.
- Hannaway,D.(1994),*School Development Series: Improving Education*,_London: Cass el.
- , *Decentralization and School Improvement: Can we Fulfil the Promise?.* San Fransisco: Jossey. Bass Publishers.

- Holmes, Mark dan Edward, A.W. (1989). *Education Policy Perspectives: Making The School an Effective Community*. New York: The Falmer Press
- Houston,W.R.(1977). *Exporing Competency Based Educational*. California: MrCuttrham Publishing Corporation
- Huitt, W. (1995). *Success in the information age: A paradigm shift*. Background paper developed for workshop presentation at the Georgia Independent School Association, Atlanta, Georgia. Retrieved September 1997. from [http:// chiron.valdosta.edu/ whuitt /col/context/infoage.html](http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/context/infoage.html)
- (1999). *Implementing effective school achievement reform: Four principles*. Paper presented at the School Counseling Summit, Valdosta State University, Valdosta, GA, April 20. Retrieved May 2003, from [http:// chiron.valdosta.edu/ whuitt/ files/school_reform.html](http://chiron.valdosta.edu/whuitt/files/school_reform.html)
- ILO. (1999, May). *Strategies to Combat Youth Unemployment and Marginalisation in Anglophone Africa. Draft. ILO/SAMAT*, Geneva: International Labor Office.
- James P.Lester dan Joseph Stewart.(2000). *Public Policy: an Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth.
- Jenkins, W.I. (1978). *Policy Analysis*. Oxford : Martin Robertson.
- Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Terjemahan Ricy Istamto. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Juran,J.,Gryna,F.M.,(1980).*Policies and Objectives.Quality Planning and Analysis*. New York : MCGraw-Hill.
- Kemple, James, and Judith Scott-Clayton. (2004). *Career Academies: Impacts on Labor Market Outcomes and Educational Attainment*. New York: MDRC.
- Kenny, D.A.(1979).*Correlation and causality*. New York:John Wiley & Sons, Inc.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/Tahun 2002. Tentang Akreditasi.
- Kerlinger Fred N. (1988). *Foundation of Behavior Research - Edisi Bahasa Indonesia*. Jogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Kesteren,J.M.Van.(1996). *Doorlichten an Herontwerpen van Organizatie Complexen*. Thesis :University of Groningen.
- Kuswana,W.S.(1998). *Pemberdayaan Majelis Sekolah, dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Guru SMK Teknologi*. Tesis pada FPS IKIP Bandung tidak diterbitkan.
- Levesque, Karen. 2003b. *Trends in High School Vocational/Technical Coursetaking: 1982–1998*. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Institute of Education.
- Lockheed,M,E,(1988). *The Measurement of Educational Efficiency and Effectiveness*. New Orleans. AERA Paper.
- Loose,G.(1988). *Vocational Education in Transition : A Seven Country Study of Curricula for lifelong Voacational Learning*. Humberg : Unesco Institut for Education.
- Lorti,D.C.(1973).*Observation on Teaching as Work, in R.M.Travers*. Chiocago: Rand McNally.
- Lunenburg C. Fred and Allan C Ornstein (2000).*Educational Administration. Concept and Practices*. Australia : Wadsworth.
- Mandke. (1992). *Development Vocational Instructions*. California: David S Lake Publisher.
- Mather P.M. (1976), “*Computational Methods of Multivariate Analysis in Physical Geography*”.USA: John Wiley and Sons.

- Mazmanian, Daniel H.P.A.Sabitier.(1983). *Implementation an Public Policy*. New York: Herper Collins.
- Middleton,J, Demsky,T.(1989). *Vocational Educational and Training: A Review of World Bank Investment*. Washington,D.C : World Bank
- Mohrman,S.A.,Wohistetts, and Aterbury, (1993), *School Based Management: Organizing for High Performance*: San Fransisco: Josey.Bass Publishers.
- Mortimore.,P.,Blackstone. (1982). *Disadvantage end Educaton*. London: Heineman.
- Mortimore.,P.Sammons. (1988). *School Maters: The Junior Years*. Somerset : Open Books.
- Mortimore.,P.,Whitty.(1997). *Can School Improvement Overcome the Effect of Disadvantage*. London: Heineman.
- Munch.J.(1983). *The Dual System :The Vocational Training in The Federal Republic of Germany*. Bon : Expert Verlag.
- Nana Syaodih. (2002). *Pengendalian Mutu SMK di Jawa Barat*. Bandung :Pascasarjana.
- Nasution. M.N. (2004). *Manajemen Mutu Terpadu*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ning Zhang and Katrina Ball. (2002). *Explanations to the Vocational Education Law of the People's Republic of China*, Hong Qi Press, Beijing, October.
- Niskanen,W.A.(1971).*Bureaucracy and Representative Government*. Chicago: Aldine-Attherton.
- Nugroho,R.D. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- O'Brien,Robert, et. al. (2000).*Contesting for Global Governance*. Cambridge: University Press.
- Osborne.D., Gaebler.T.(1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*.New York:Penguins Books.
- Palumbo.D.(1988). *The Politics of Program Evaluation*. Sage: Beverly Hills CA.
- Parasuraman,V.A. Zeithaml dan L.L. Berry (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implication for Future Research.Journal of Marketing (Fall):41-50.
- Patton, C.V.& Davis, S.S.(1986). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2005). Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia
- Peters,Guy B.(1993). *American Public Policy: Promise and Performance*. USA : Chatam, N.J Chatam House.
- Pfeffer,J.Salancik.(1978). *The External Control of Organization: A Resource Dependence Perspective*. New York:Herper and Row.
- Purkey,S.C.Smith.(1983).Effective Shools: A Review, in The Elementary School Journal, 83,pp.427-452.
- Putra. F. (2003). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Razik, A.T dan Swanson, D. A. (1995). *Fundamental Concepts of Educational Leasership and Management*. Columbus : Merril an Imprint of Prentic Hall.
- Rodney ., Guti,J.W.(1991). *Educational Administration and Policy Effectife Leadership for American Eduaction*.Second Edition. Massachusettes: A Division of Simon & Schuster.
- Ross, J.E. (1994). *Principles of Total Quality*. Delray Beach: St. Lucie Press.
- Sallis, E. (1993). *Total Quality Management in Education*.London:Kogan.

- Scott, R. (1994). *School Based Management*. School Talk Magazine.
- Scheerens, P. (1987). *Enhancing Educational Opportunities for Disadvantaged Learners*: Amsterdam : Nort-Holland Publishing Company.
- (1990). *School Effectiveness and The Devopment of Process Indicators of School Functioning in school Effectiveness and School Improvement*, b 1. pp.61-80.
- Schumacker, R.E. (1996). *A beginner's guid to structural equation modeling.*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Shafritz, Jay M., A.C. Hyde. (1987). *Classic of Public Administration*. California: Brooks/ Cole Publishing Company.
- Shafritz, Jay M., E.W. Russel. (2005). *Introducing Public Administration*. New York: Pearson Education, Inc
- Shuhman, L. (1986). *Paradigms and Research Programs in The Study of Teaching: A Contemporary Perspective*. New York: Macmillan.
- Silverberg, Marsha, Elizabeth Warner, David Goodwin, and Michael Fong. (2002). *National Assessment of Vocational Education: Interim Report to Congress*. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Office of the Under Secretary.
- Simanjuntak, P. (2005). *Manajemen dan Evaluai Kinerja*. Jakarta: LP.FE UI.
- Sink, D. Scott. (1985). *Productivity Management : Planning, Measurement and Evaluation, Control and Improvement*. United States of America : John Wiley and Sons.
- Smith, P. (1996). *Measuring Outcome in The Public Sector*. London: Taylor & Francis.
- Sobandi, B. (2004). *Etika Kebijakan Publik*. Bandung : Humaniora.
- Sugiyono (2004). *Statistik*. Bandung : Alfabeta.
- (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Supriadi D., Adiat A. Sudrajat. (2002). *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia*. Jakarta: Depdiknas.
- Suryadi, A. (1993). *Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Tarsito.
- Tangkilisan, H. (2003). *Evaluasi Kebijakan : Yogyakarta : Balaiurang & CO*.
- Thomas J.A. (1970). *The Productive School, A System Analisis Approach, to Education Administration*. New York: John Willey & Son, Inc.
- Tilaar R.A.H., Ace Suryadi. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Tarsito.
- UNESCO (1996). *Analyses, agendas and priorities for education in Africa. Working Series No. ED-96/ WS/13*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UU Nomor.20.TAHUN 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003
- , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
- Wheelen, T.L., J. David. H. (1999), "Strategic Management and Business Policy".
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan*. Yogyakarta: Media Pressindo.

RIWAYAT HIDUP



Wowo Sunaryo Kuswana, lahir di Garut Jawa Barat pada tahun 1957 dari pasangan R.Tanoe Widjaja (Alm) dengan Ny. Romlah. Menikah dengan Hasnah Bin H.H. Soeleman, berasal dari Kalimantan Tengah. Hasil pernikahan telah dikaruniai dua orang putri yakni Henny Septiani mahasiswi Universitas Padjadjaran, Osi Arutanti mahasiswi ITB dan seorang putra Ojan Prabowo, yang masih duduk di SMP Negeri 5 Bandung.

Sebelum menempuh SD-SLTP-SLTA di Garut, dan S-1 FPTK IKIP Bandung, S-2 Administrasi Pendidikan di IKIP Bandung, pada tahun 2001 mendapat kesempatan mengikuti pendidikan pada S-3 Administrasi Pendidikan Konsentrasi Kebijakan Pendidikan di PFS Universitas Pendidikan Indonesia.

Pekerjaan tetap saat ini, sebagai staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI, dalam mata kuliah Kajian Pendidikan Teknologi dan Kejuruan; Manajemen Pendidikan Teknologi dan Kejuruan; Motor Bensin dan Diesel. Pengalaman mengajar, sebagai guru tidak tetap dimulai dari SMP, SMA, SPG, SMK sampai dengan beberapa PTS di Jawa Barat (antara 1981-1994).

Pengalaman pengembangan pendidikan; Anggota Tim Pokja Manajemen Berbasis Sekolah Provinsi Jawa Barat (2001-2003), Pengembang Pelatihan pada UPTD BPG Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2003-2006); Anggota Pengembang Sistem Uji Kompetensi Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (1999); Anggota Pengembang SPM Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (1999); Anggota Pengembang Kapasitas Organisasi Pusdiklat Dep. Kimpraswil (2003); Pengembang Teknologi Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2004-2006), dan Penatar Kurikulum dan Pembelajaran KBK Provinsi Jawa Barat (2003-2006).

Karya Tulis, berupa bahan ajar yang digunakan di lingkungan JPTM FPTK UPI, tiga tahun terakhir; (1) Motor Diesel; (2) Motor Bensin; (3) Pengantar Pendidikan Teknologi dan Kejuruan; (4) Manajemen Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.

Rangkuman penelitian

Karya Tulis, berupa bahan ajar pelatihan yang digunakan pada UPTD Balai Pelatihan Guru (UPTD BPG) dan Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tiga tahun terakhir: (1) Dimensi Taksonomi Pembelajaran; (2) Model-model Belajar Teori dan Praktik; (3) Konsep dan Praktik Membuat Bahan Ajar Berbasis Komputer (Multi Media Interaktif, Video Film dan Pembelajaran Jarak Jauh); dan (4) Penilaian Pembelajaran Psikomotorik dalam Mata Pelajaran Produktif di SMK Teknologi.

Karya Penelitian (tiga tahun terakhir): (1) Identifikasi Kemampuan Guru dalam Pengembangan Model dan Media Pembelajaran Tingkat SD; SMP; SMA dan SMK di Jawa Barat (Tahun 2003-2006); (2) Pengaruh Anatomi Tubuh, Minat dan Pengetahuan Bawaan, terhadap Pencapaian Kompetensi Teknis Motor Bensin Mahasiswa JPTM FPTK UPI Tahun 2006.